

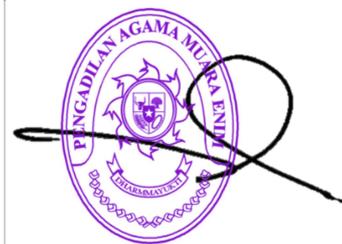


PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK OLEH ATASAN PPID

Kode Dokumen	:	SOP/AP/78
Tanggal Pembuatan	:	01/11/2023
Tanggal Revisi	:	15/07/2024
Tanggal Efektif	:	15/07/2024

Disetujui Oleh,



Amrin Salim, S.Ag., M.A.
Ketua Pengadilan Agama

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM Dilarang mengandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapuntanpa seizin PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM



**PENGADILAN AGAMA
MUARA ENIM KELAS IB**
Jl. Tjiek Agus Kiemas, SH. Nomor 1
Muara Enim Telp: (0734) 7420107

Nomor SOP	SOP/AS/01
Tanggal Pembuatan	01/11/2023
Tanggal Revisi	15/07/2024
Tanggal Eektif	15/07/2024
Ditetapkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Muara Enim

**SOP PENANGANAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK OLEH ATASAN
PPID**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

Keterkaitan :

1. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP
2. SOP Pengujian Konsekuensi

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan informasi tidak berjalan efektif

Kualifikasi Pelaksana :

- Memahami SOP Permohonan Informasi Publik
- Memahami SOP Penyediaan Informasi yang belum tersedia dalam Daftar Informasi Publik (DIP)
- Memahami jenis informasi terbuka dan dikecualikan
- Memahami pengujian konsekuensi

Peralatan/Perlengkapan :

Surat permohonan informasi,
Surat tanggapan atas keberatan
computer dan kelengkapannya

Pencatatan dan Pendataan :

NO	Aktivitas	Pelaksanaan			Mutu Baku			Ket
		Atasan PPID	Tim Kuasa Hukum	Tim Pertimbangan	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan, kemudian menetapkan tim kuasa hukum untuk melakukan penanganan sengketa informasi public				Panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan	Disesuaikan dengan sidang di KIP	Panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan	
2	Meminta pertimbangan terhadap sengketa informasi public				Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi		Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi	
3	Memberikan pertimbangan sengketa informasi public				Notulensi atau berita acara pleno		Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi, notulensi	
4	Melakukan upaya penanganan sengketa informasi public				Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi, notulensi		Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi, notulensi	